

PEREMPUAN DIANTARA
 AGENDA BESAR
 "ACEH *RECOVERY*"

Samsidar

"Konsorsium Aceh *Recovery* akan memulai pembangunan di Nanggroe Aceh Darussalam pada akhir 2003. Untuk tahap pertama telah dibangun pemasangan instalasi listrik teknologi Baterai di Pulau Nasi. Total dana yang diinvestasikan mencapai Rp. 3 triliun. Untuk me-*recover* (memulihkan) Aceh ada program yang namanya Aceh *Smart Province* yaitu lembaga penjamin kredit."¹

Itulah cuplikan berita tentang *recovery* Aceh yang diwartakan oleh sebuah koran nasional terbitan Jakarta dengan judul *Dana Pembangunan Aceh Rp. 3 Triliun*. Berita ini diturunkan sehari setelah keputusan Pemerintah yang didukung Komisi I DPR untuk memperpanjang status darurat militer di Nanggroe Aceh Darussalam selama enam bulan. *Recovery* Aceh yang salah satunya melalui operasi kemanusiaan adalah bagian dari implementasi operasi terpadu di Aceh.

Membaca berita tersebut saya langsung teringat Aceh dan bertanya dalam hati, dimanakah perempuan Aceh dalam program penyaluran dana ini, adakah mereka menjadi prioritas, dapatkah luka dan bebannya terbantu dan terpulihkan? Bagi saya dan mungkin bagi perempuan Aceh lainnya jumlah uang tersebut mungkin tak terbayangkan, dan yang pasti itu bukanlah satu-satunya program *recovery* Aceh. Sudah banyak upaya pemulihan dengan mewujudkan penyelesaian konflik Aceh dengan beragam pendekatan telah dicetuskan seperti; 'jeda kemanusiaan', 'moratorium', 'dialog dalam damai' bahkan penetapan Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam yang bersyariah Islam dicanangkan. Namun fakta yang terbentang adalah Aceh masih berkutut dengan *darulharb* (negeri yang kacau balau) yang tak berperikemanusiaan. Seiring dengan hal itu korban masih berjatuh, sejak Agustus 1998 sampai Mei 2002, sudah 4.210 manusia yang meninggal,² di antaranya termasuk perempuan sebagai kelompok yang paling rentan.

Sejak status Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut kekerasan terhadap perempuan tak pernah berhenti. Kekerasan terhadap

perempuan pasca DOM 1998-2000 di Aceh bervariasi dari mulai bentuk-bentuk intimidasi seperti razia jilbab hingga bentuk penyerangan yang dapat membahayakan atau menghilangkan nyawa perempuan seperti penculikan, penembakan, pembunuhan dan penganiayaan seksual. Pelaku kekerasan menurut identifikasi korban adalah aparat keamanan, sipil



Perempuan Aceh, tak henti didera konflik

bersenjata dan 'orang tak dikenal. Tindak kekerasan ini biasanya terjadi di tempat umum, rumah korban, dan lokasi pengungsian.³

Potret Kekerasan Terhadap Perempuan Pasca DOM di Aceh 1998 - 2000

| Bentuk Kekerasan | Jumlah Korban | Identitas Pelaku | Lokasi Kejadian |
|---|---------------|---|---|
| Penembakan | 56 orang | - aparat keamanan - sipil bersenjata - 'orang tak dikenal' | - tempat umum - rumah korban - lokasi pengungsian |
| Penculikan dan penghilangan | 8 orang | - 'orang tak dikenal' | - tempat umum - kebun korban |
| Pembunuhan | 7 orang | - 'orang tak dikenal' | - tempat umum - rumah korban |
| Penganiayaan | 26 orang | - aparat keamanan - 'kelompok tak dikenal' - siswa | - markas aparat keamanan - lokasi pengungsian - sekolah - rumah korban |
| Pembakaran, penjarahan dan perampokan | 19 orang | - aparat keamanan - sipil bersenjata - 'orang tak dikenal' | - tempat umum - rumah korban |
| Kekerasan seksual (perkosaan dan pelecehan seksual) | 20 orang | - 'kelompok bertopeng & berseragam loreng' - aparat keamanan - 'orang tak dikenal' - warga sipil | - rumah korban |
| Intimidasi berbasis gender ('rasia jilbab') | 40 orang | - kelompok pemuda | - jalan umum - pasar - mesjid - rumah korban |
| Kekerasan dalam relasi personal | 9 orang | - suami - ayah - anak tiri - istri pertama | - rumah korban |

Sumber: Diambil dari Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia 2002*

Pada tanggal 12 Desember 2002 ditandatangani Kesepakatan Penghentian Permusuhan atau *Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)* antara Pemerintah RI (dalam hal ini TNI) dan GAM.⁴ Lalu penetapan Aceh sebagai Daerah Darurat Militer melalui 'Operasi Terpadu' juga telah dicanangkan pada tanggal 19 Mei 2003. Pada masa ini pun korban

berjatuhan, tiga bulan pertama sejak diberlakukan, ada 342 warga sipil yang tewas, 94 luka-luka dan 108 hilang.⁵

Angka-angka korban di atas tentunya akan bertambah dan mungkin jauh lebih besar, begitu juga tentunya dengan "dana" yang mengalir ke Aceh yang juga berasal dari berbagai sumber. Namun bila kita hanya berpatokan pada angka, mungkin sampai saat ini pun belum tentu didapat secara akurat dan rinci berapa jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dan berapa banyak dana yang telah dialokasikan untuk berbagai upaya pemulihan bagi korban dan masyarakat yang bernama perempuan. Persoalan utamanya bukan sebatas *rigid*-nya angka tersebut dan juga tidak sesederhana merespon dan menuangkannya dalam sebuah kebijakan tanpa memahami penderitaan mereka.

Ada baiknya saya memaparkan fakta yang terbentang maupun tersembunyi dari berbagai cerita, pengalaman perjalanan hidup perempuan di Aceh, dan posisinya dalam belantara dan hiruk pikuk konflik serta agenda pemulihan Aceh.

Menggalang Solidaritas Berarti Mempertaruhkan Kemanusiaan

Judul kecil ini menjadi sangat ironis dan menampakkan kepesimisan, tetapi itulah yang harus dipikirkan ulang dan kerap memundurkan langkah. Ketika arus pengungsian begitu deras, warga mengungsi di mana-mana, dan sudah pasti terjadi kekurangan di sana-sini. Namun pada kondisi yang krisis ini para relawan perempuan diputuskan untuk tidak memberi respon *emergency* memberi bantuan makanan, obat-obatan dan kebutuhan spesifik perempuan walaupun mereka tahu dan memiliki pengalaman bertahun-tahun bahwa biasanya hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pengungsi perempuan sering diabaikan. Bukan hanya itu, pemberian bantuan secara perorangan yang bukan di dalam lokasi pengungsian melainkan di pasca pengungsian pun tidak bisa dilakukan. Semua itu terjadi karena rasa solidaritas, empati sesama manusia bahkan dari sesama perempuan pun ternyata tidak bisa menerobos benteng kecurigaan yang berlebihan dan kerap tanpa argumentasi yang jelas. Benteng kecurigaan itu adalah apa yang disebut 'menjaga stabilitas keamanan', atau 'mencegah kekacauan'. Siapapun dan kapanpun aktivitas yang terjadi di tengah masyarakat harus dilaporkan dan dipantau.

Alih-alih melaporkan, salah sedikit bisa masuk bui atau mendapatkan status sebagai 'orang hilang'. Ketika sebuah rapat koordinasi digelar oleh pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam penyaluran bantuan kemanusiaan dihadirkan, secara terang-terangan rapat ini menolak kehadiran dan kerjasama LSM.

Ada pandangan bahwa kehadiran para aktivis perempuan akan memperkeruh dan akan mengacaukan kerja besar operasi kemanusiaan. Tentu saja pandangan ini patut kita sesali karena berarti kita tidak bisa memberi bantuan yang khusus pada kebutuhan-kebutuhan perempuan di wilayah konflik.

Ada kasus lainnya di sebuah wilayah kecamatan di Aceh ketika penduduk mengajak para relawan turun bersama membantu pengungsian. Apa yang terjadi selanjutnya? 'Kasak-kusuk' dari pihak lain mulai dilontarkan bahwa para relawan ini adalah kaki tangan dan mata-mata si Pa'i,⁶ lalu dimasukkan dalam *blacklist* sebagai organisasi yang harus diawasi.

Rasa solidaritas, keinginan dan kebutuhan untuk menggalang bantuan sebetulnya ada pada diri perempuan. Keputusan menghentikan bantuan ini bukan karena keengganan dan rasa kemanusiaan yang kian menipis seperti yang telah dijelaskan di atas, melainkan atas dasar alasan-alasan tadi. Akhirnya para relawan ini lebih memilih menunda, diam dan terkadang pasrah walaupun dengan sebuah penyesalan yang dalam dan berkepanjangan.

Berikut adalah peristiwa yang terjadi di tengah situasi genting Aceh yang tak kian mereda.⁷

"Malam itu, suara letusan bergema beberapa kali dan suara teriakan minta tolong terdengar dekat sekali dari seberang rumah saya. Saya ketakutan, begitu juga dengan anak-anak. Tanpa ada yang bersuara kami semuanya tiarap.⁸

Anak-anak saya isyaratkan diam, jangan berisik dan meminta suami saya untuk tidak keluar rumah. Saya menangis tanpa bersuara, sudah bisa memastikan apa yang akan terjadi, siapa lagi kali ini, tanya saya di dalam hati. Setelah suara-suara gaduh di luar reda dan sepertinya kelompok bersenjata itu telah pergi,

barulah saya, suami, dan anak-anak serta tetangga yang lainnya berdatangan ke rumah yang meminta tolong, kami menemukan suami tetanggaku tersebut sudah jadi mayat. Sampai kapanpun rasanya saya tidak bisa lupa itu."

Bahkan seorang anak bercerita:

Kami seisi rumah mendengar suara kresek-kresek dan suara orang-orang berkata, "Ayo cepat, siram, siram lagi." Ibu mencoba mengintip dari sela-sela dinding, "Ya Allah mereka membakar!" bisik Ibu. Cepat-cepat saya tarik tangan Ibu dan menjauhkannya dari dinding itu, lalu kami tiarap ketika bunyi letusan senjata terdengar. Ternyata sekolah saya dibakar, kenapa ya sekolah saya dibakar?"

Mendengar cerita di atas, maka dalam perjalanan melintasi bangunan-bangunan sekolah yang gosong, tenda-tenda sekolah darurat, saya kembali teringat pada anak itu. Mereka dihadapkan pada situasi yang tidak lagi punya pilihan selain keselamatan bahkan nyawa diri dan keluarga mereka, bahkan tetangganya sendiri, orang yang telah bertahun-tahun hidup berdampingan dalam sebuah komunitas.

Ketulusan, empati dan solidaritas dari para relawan perempuan pun dihadapkan dengan terancamnya keselamatan diri dan kelompok. Namun bukan berarti para relawan perempuan ini berhenti dengan mengatakan, "kami tidak bisa lagi bekerja, nyawa kami terancam". Kabar gembiranya adalah perempuan di Aceh yang menjadi korban konflik sering berbagi dalam kebutuhan mereka yang dapat kita lihat di *camp* pengungsian. Mereka berbagi makanan dan susu bayi yang tidak begitu banyak. Ketika ada yang sakit, seseorang terpanggil untuk ikut merawat atau sakadar menemani keluarga yang lain. Bersama-sama menganyam tikar dan mengupas pinang, mereka saling berbagi pengetahuan tentang bagaimana kemungkinan mencari nafkah.

Begitu banyak peran perempuan termasuk menjemput mayat para suami atau laki-laki yang tewas ketika di rumah sakit atau di tempat-tempat ditemukan mayat sambil melakukan *tahlilan*, mendukung secara spirituil maupun materil. Mereka kemudian harus tetap tinggal di desa untuk melanjutkan hidup setelah para suami pergi meninggalkan desa,

meninggal, hilang, atau sengaja meninggalkan desa dengan alasan konflik dan keamanan. Mereka beriringan pergi ke kebun bahkan pinggiran hutan, sekadar mencari makan. Lihatlah di pinggiran sungai di sana, kelompok perempuan ikut menggali pasir dan koral. Ketika kampung janda ada di mana-mana, dengan tekad baja mereka menjadi kepala keluarga, bahkan di beberapa desa dan kabupaten mereka mengorganisir diri, berbagi pengalaman dan menggali potensi dalam sebuah kelompok yang diberi nama *Peka*.¹⁰



Dok.YIP

Aktivitas perempuan Aceh di pasar

Berbagai hambatan dan ancaman kekerasan memang sewaktu-waktu terjadi, tetapi masih ada kelompok perempuan yang tetap berupaya menggalang solidaritas agar bisa menghidupkan kembali kelompok pengajian, melakukan kajian Islam dari satu desa ke desa yang lain, mendirikan kelompok perempuan untuk koperasi dan pemulihan ekonomi. Masih ada pula kelompok dan individu yang mengagas, menggerakkan bahkan menjadi guru pendidikan alternatif bagi anak-anak yang tidak bersekolah lagi dengan beragam karakter, padahal lokasinya jauh di desa. Ketika ditanya siapa yang paling peduli dan mendukung program-program sebuah organisasi yang masih berjalan di sebuah desa, jawabannya adalah para perempuan. Kebanyakan perempuanlah yang antusias, konsisten ikut membagi pengalaman mereka sehingga konsep, persiapan dan rangkaian untuk melaksanakan *trauma healing* berbasis komunitas yang juga digagas oleh beberapa individu dan kelompok perempuan dapat diwujudkan.

Luka Panjang dan Kesepakatan Bisu

Upaya pemulihan yang dicanangkan tidak bisa begitu saja mengikis konstruksi kekerasan karena konflik di Aceh yang begitu lama. Salah satunya adalah ketika seorang laki-laki baik yang berprofesi prajurit

atau siapapun dalam kondisi stres atau depresi, mereka banyak menjadikan alasan ini sebagai legitimasi bahwa mereka memerlukan hiburan melampiaskan kebutuhan biologisnya. Cukup bermartabatkah alasan ini sebagai seorang manusia dan bisakah ini dikatakan sebagai kekhilafan akibat perang? Bagaimana bila tempat pelampiasan dan kekhilafan itu adalah tubuh manusia yang berstatus istri, ibu, saudara perempuan atau anak?

Pelecehan seksual dan perkosaan bukanlah sebuah bayang-bayang rekaan di wilayah seperti Nanggroe Aceh Darussalam melainkan sebuah kenyataan yang menyakitkan. Namun fakta ini lebih banyak disembunyikan dan kurang terdengar. Di bawah ini adalah penggalan pengalaman saya dalam sebuah diskusi tentang kekerasan seksual perempuan Aceh yang dapat dijadikan potret atau miniatur pandangan serta sikap masyarakat Aceh.

"Apakah mungkin di Serambi Mekah ini ada kekerasan seksual seperti itu?" tanya seorang peserta. "Menurut saya perempuannya yang tidak tahu diri dan tidak bermoral," sahut peserta yang lain. "Pakaiannya sih merangsang laki-laki," terdengar celetukan yang diiringi gelak tawa yang lumayan ramai. Seorang peserta perempuan dengan lantang mengatakan, "suami saya sebagai pengacara yang menangani beberapa perkara perempuan yang mengaku mengalami perkosaan, ternyata itu suka sama suka lho, ya salah perempuannya dong...." perkataan peserta ini lalu di-amin-kan hampir sebagian besar peserta."

Kehilangan kata-kata yang lebih arif, saya terkejut mendengar komentar-komentar peserta itu dan selanjutnya saya berkata:

"Cobalah saudara-saudara lihat perempuan di sini, di Aceh ini, lihat pakaiannya, jilbabnya, di antara para korban bahkan ada yang masih gadis kecil, apakah mereka penggoda? Siapa sebenarnya yang tak bermoral? Dimana moral pelakunya, apakah kita lupa itu? Apakah karena terangsang lalu berhak memperkosa? Apakah kalau pacaran menjadi sah untuk diperkosa? Bagaimana mungkin kita sebagai

orang Aceh yang tinggal di Aceh bisa mengingkarnya, saya bisa mengerti kalau yang mengingkari dan bertanya-tanya seperti tadi adalah orang yang tidak pernah tinggal di Aceh dan saya bisa mengerti dan sangat mengerti sekarang kenapa perempuan korban kekerasan seksual akhirnya diam dan menyembunyikan dirinya. Salah satu sebabnya adalah mereka punya saudara, punya tetangga bahkan mungkin punya penegak hukum yang pandangannya seperti...".

Saya tidak melanjutkan perkataan saya, tetapi sebenarnya kata lanjutan itu adalah "saudara-saudara sekalian yang terhormat". Hampir semua peserta terdiam, ruangan itu hening beberapa saat, entah karena malu digugat ke-Aceh-annya ataupun marah atau *shock* dihadapkan dengan kenyataan sebenarnya.

Ketika sebuah Peradilan Militer memutuskan perkara perkosaan oleh prajurit TNI terhadap empat orang perempuan Aceh yang berumur antara 19 hingga 22 tahun dengan putusan hukuman dipecat dari kesatuan dan kurungan 2 tahun 6 bulan hingga 3 tahun,¹⁰ keputusan ini memunculkan reaksi keras terutama di kalangan aktivis HAM yang kemudian dengan gencar mendesak organisasi perempuan untuk membuat pernyataan publik tentang hal itu.¹¹ Sebuah pertanyaan sederhana pun muncul, "*kenapa harus meminta organisasi perempuan yang melakukan, apakah harus selalu perempuan yang bicara tentang perkosaan?*"

Saya kembali teringat dialog bersama seorang teman "paralegal" dengan seorang polisi di sebuah ruang pengaduan Polres yang berkata kira-kira seperti ini, "Wah ini sebenarnya hanya kasus biasa, korban dan pelakunya juga berada di wilayah terpencil, kasus ini tidak akan besar kalau bukan lembaga kalian yang mengangkat dan membesarkannya, cobalah mengerti kita masih banyak kerja dan pikiran dengan konflik Aceh." Hampir saja teman saya itu bangkit dari kursi yang didudukinya dan kemudian mengatakan, "Bagaimana kalau yang diperkosa ini anak Bapak, apa Bapak akan menganggap dan berkata ini kasus kecil yang dibesar-besarkan? Polisi itu jelas tersentak, mungkin tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. Lalu dengan gagap dan mencoba mengalihkan persoalan berkata, "ah, kamu ini serius amat, saya hanya bercanda kok."¹²

Kasus-kasus lainnya seperti perkosaan dalam bentuk *incest*, atau anak di bawah umur sebelumnya diputuskan lewat banding dengan 6 tahun penjara dipotong masa tahanan, tetapi kemudian hakim Pengadilan Negeri memutuskan 2 tahun penjara potong masa tahanan meskipun jelas siapa pemerkosanya dan itupun harus diuji DNA terlebih dahulu karena telah korban telah melahirkan anak. Korban yang masih gadis belia itu berkata pada saya.

"aku benci Ibu dan Abangku, kesakitanku, penghinaan yang kurasakan, dihargai empat juta rupiah, aku benci, malu, aku tidak bisa sekolah lagi, semua temanku, semua orang akan tahu dan pasti mengatakannya, kalau tahu akan seperti ini lebih bagus aku diam, tidak memberitahu kepada siapapun dan mungkin aku masih bisa sekolah".

Teriakan dan tangis putus asa gadis belia yang datang pada saya dan di antar oleh seorang teman membuat saya tidak mampu berkata apa-apa, kecuali mencatat dalam hati bahwa satu lagi telah berlangsung apa yang disebut dengan *justice delayed can be justice denied*, bahwa keadilan yang tertunda akan meniadakan keadilan.¹³

Beberapa waktu kemudian, kami kedatangan sepucuk surat dari sebuah organisasi perempuan di Aceh dan surat itu menimbulkan banyak pertanyaan dalam diskusi kecil kami di kantor, yang isinya:

"selama tahun 2003, tidak ada satu pun kasus kekerasan terhadap perempuan yang kami tangani, kemungkinannya adalah kondisi di Aceh membuat perempuan enggan atau takut melaporkan kekerasan yang dialaminya".

Beberapa perempuan yang saya datangi dalam sebuah penelitian yang saya lakukan di sana meminta agar kisahnya tidak usah ditulis, saya cukup mendengarkan, mengetahui serta mempercayai pengalamannya sebagai korban kekerasan seksual. Saya hanya bisa menyimpulkan bahwa perempuan itu ingin melupakannya tetapi tidak pernah terlupakan dari luka, penghinaan, dan penghancuran martabatnya sebagai manusia yang meninggalkan luka hampir di sepanjang

hidupnya yang kemudian memutuskan untuk bertindak *conspiracy of silence*.¹⁴ Sebuah kesepakatan diam-diam baik oleh masyarakat umum maupun korbannya untuk bersikap seakan-akan tidak terjadi apa-apa karena adanya pengingkaran, pembiaran, pembungkaman dan pelupaan serta ketidakmampuan sistem yang ada dalam melindungi perempuan khususnya bagi korban untuk mendapatkan haknya. Sementara itu pelaku kejahatan bebas berkeliaran tanpa proses peradilan.

Di tengah luka, kegelapan dan pengingkaran martabat manusia yang bernama perempuan itulah sebenarnya individu ataupun kelompok perempuan masih mencoba memberi warna, secara berkala melakukan diskusi paralegal bagi komunitas perempuan, seperti melakukan pendampingan psikososial dan bantuan hukum, serta masih ada ibu-ibu di desa yang memberi kekuatan dan setia dengan segala kekurangan yang dipunyainya. Namun mereka mencoba memberi semangat dan harapan kepada korban dan keluarganya, bahkan mereka sudah seperti seorang konselor.

Membangun Sosok Pemulihan - Merajut Harapan untuk Kedamaian

Oh indahnya kedamaian, di antara anak-anak, hitam atau putih tidak masalah kaya atau miskin kita saudara, bernyanyi bersama gelak gembira senyum canda, oh indahnya kedamaian...¹⁵

Lagu itu dinyanyikan oleh hampir 40 orang anak di sebuah desa Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah dengan didampingi dan disaksikan oleh para orang tua, beberapa petinggi Pemerintah Sipil dan Militer dari kecamatan. Mereka bukan kelompok *koor* yang tengah unjuk kemampuan sebuah festival anak. Mereka adalah anak-anak peserta program *trauma healing* yang diorganisir oleh salah satu LSM perempuan Aceh dan ibu-ibu desa. Hari itu mereka bukan semata bernyanyi karena gembira layaknya anak-anak. Mereka memang bernyanyi, membaca puisi dan ber-*didong*¹⁶ tetapi juga sebenarnya mereka sedang berbagi pengalaman dan mengungkapkan suara hati mereka, mempertanyakan keberadaan dan kerinduan mereka pada Ayah yang tidak pernah kembali, rumah-rumah dan sekolah yang dibakar, kegelisahan mereka tentang cita-cita dan masa depannya, imbauan dan harapan mereka untuk sebuah perdamaian.

Perlu waktu berbulan-bulan dan di saat mereka bermain sambil belajar mengungkapkan pengalaman mereka. Mereka selalu ditemani ibu mereka, ibu-ibu desa yang membuat makanan tambahan dan membantu mengajarkan rebana, lagu dan *didong* serta menyemangati anak-anak, meyakini orangtua yang lain untuk menyepakati memberi hari Minggu¹⁷ bagi kegiatan *trauma healing*. Ibu-ibu yang selalu setia mendampingi para relawan perempuan, berbagi masukan dan pengalaman sehingga seluruh warga desa ikut mendukung kegiatan.

Perempuan-perempuan desa ini dan juga desa-desa lain di Aceh tidak pernah mengucapkan kata *healing*, *recovery*, pemulihan, apalagi rekonsiliasi. Mungkin juga mereka tidak pernah dilibatkan dalam forum-forum resmi rekonsiliasi yang pernah digagas berbagai pihak, mungkin karena mereka orang desa apalagi perempuan, dianggap kurang layak untuk didengar apa pandangannya tentang rekonsiliasi dan perdamaian. Tetapi bukankah apa yang mereka lakukan seperti yang saya paparkan di dalam tulisan ini bagian dari sebuah proses pemulihan dan rekonsiliasi?

Pada kenyataannya upaya pemulihan, rekonsiliasi sudah dijalankan oleh perempuan-perempuan secara baik walaupun hanya pada lingkungan yang lebih kecil. Namun peran yang dimainkan perempuan seringkali tidak mendapat perhatian yang lebih besar apalagi peluang dan dukungan, dan dianggap tidak strategis.

Aceh memang daerah konflik bersenjata yang sedang diupayakan untuk pulih. Di antara upaya pemulihan itu ada desingan peluru, dentuman *Grenade Launcher Mechine (GLM)* dan raungan roket. Perempuan ada di tengah semua itu dan posisinya berada di antara tarik menarik berbagai kepentingan.

Pada keseharian hidup, perempuan akhirnya juga harus berekonsiliasi dengan kenyataan yang tidak pernah pasti kapan semua kekerasan berakhir dan bahkan keinginan dan harapan perempuan itu sering tergilas dengan keinginan pihak-pihak yang lebih menonjolkan maskulinitasnya terutama dalam hal konflik, peperangan atau perseteruan di antara mereka.

Perempuan dan anak bukanlah aktor atau kelompok yang memiliki kekuasaan untuk menentukan perjalanan konflik-pemulihan Aceh yang panjang dan melelahkan, pada kenyataannya yang bisa mereka lakukan

hanyalah menghimbau tentang kehidupan yang tenang, aman dan damai seperti dalam syair lagu yang sempat mereka nyanyikan, sebuah "nyanyian himbauan" yang ditujukan kepada Aman.¹⁶

*Karena lelah menanjak, sukar mendaki, lalu bermain di ujung tanduk
janganlah kemudian nyawa dipertaruhkan di ujung pedang
janganlah nafas dipertaruhkan di tempat yang tak tergapai
kalau benang kusut harusnya sekarang kembali ke gulungannya
tumbuhlah mayang, mekar jadi bunga
kasih jangan ditunda sayang jangan setengah hati
kumohon dengan tangan tengadah dan kepala tertunduk
Amanlah.. aman dunia kita amanlah...janganlah lagi kacau*

Catatan Belakang

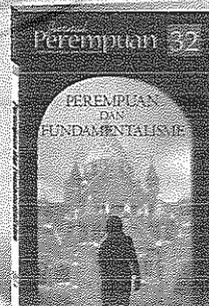
- ¹ Media Indonesia, 15 November 2003.
- ² Hasil kompilasi dari berbagai sumber: media cetak, tulis dan NGO.
- ³ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2002).
- ⁴ Lihat *ICG Asia Report No. 47, Aceh: A Fragile Peace*, 27 Februari 2003.
- ⁵ Kompas, 16 Desember 2003.
- ⁶ Adalah sebutan bagi TNI/Polri yang diidentikan dengan "pihak musuh". Sebutan ini kerap dipakai oleh pihak GAM. Tapi juga ada dipakai oleh masyarakat lain tanpa berkonotasi "pihak musuh".
- ⁷ Hasil wawancara penulis ketika ke Nanggroe Aceh Darussalam.
- ⁸ Istilah dalam Militer untuk menunjukkan posisi tengkurap tapi tetap siaga. Di Aceh posisi tiarap ini dilakukan oleh masyarakat sipil (sering secara refleks) ketika mendengar letusan senjata api atau GLM dan bom dengan maksud menghindari dari sasaran peluru atau granat yang nyasar.
- ⁹ Hasil wawancara penulis ketika ke Nanggroe Aceh.
- ¹⁰ Adalah sebutan bagi TNI/Polri yang diidentikan dengan "pihak musuh". Sebutan ini kerap dipakai oleh pihak GAM. Tapi juga dipakai oleh masyarakat lain tanpa berkonotasi "pihak musuh".

- ¹¹ Kasus perkosaan 3 orang TNI terhadap 4 orang perempuan di Kabupaten Bireun yang dilakukan pada tanggal 20-22 Juni 2003.
- ¹² Kasus perkosaan oleh seorang Kepala Pos Kepolisian terhadap Anak Perempuan berumur 16 Tahun, kasus berakhir "damai" atau pencabutan perkara oleh pihak keluarga anak di sebuah Polres.
- ¹³ Geoffrey Robertson QC, *Kejahatan terhadap kemanusiaan* (Jakarta: Komnas HAM, 2002).
- ¹⁴ Geoffrey Robertson, *ibid.*, 2002.
- ¹⁵ Lagu *I Have a Dream* oleh *West Life* yang syairnya sudah diubah. Lagu ini dinyanyikan oleh anak-anak Pengungsian di Ambon dan kemudian rekan Baytuleka mengajarnya kepada saya. Setelah liriknya diubah, saya transfer ke relawan perempuan untuk diajarkan kepada anak-anak program *trauma healing* dan pendidikan alternatif.
- ¹⁶ Kesenian tradisional Gayo-Aceh Tengah, yang dinyanyikan sambil duduk bersila dan bertepuk tangan.
- ¹⁷ Biasanya pada hari minggu karena libur sekolah Anak-Anak diharuskan membantu orangtuanya di Kebun atau di rumah.
- ¹⁸ Sebutan untuk laki-laki Gayo yang telah beristri dan apabila telah punya anak, maka akan disebut dengan *Aman*. (maksudnya Bapak si..), bisa juga diartikan dengan kondisi aman. Lagu Aman ini khusus diciptakan dan di-*didongkan* oleh Daman Dewantara untuk menghimbau agar dihentikannya perang ketika pergolakan DI/TII di Aceh pada tahun 1951-1953.

DAPATKAN JURNAL PEREMPUAN EDISI 32

PEREMPUAN DAN FUNDAMENTALISME

Fenomena fundamentalisme sering memiliki *image* yang maskulin, seperti isu terorisme. Padahal ada sisi manusiawi yang penting dikemukakan, yaitu sisi feminin dimana perempuan seringkali tidak dibicarakan dalam hal ini



Jurnal
Perempuan
untuk pencerahan dan keadilan

**Persoalan perempuan sering
tidak menjadi aktual,
untuk itu silahkan klik di**

www.yjp.or.id

Mulai sekarang Anda bisa mengikuti perkembangan isu perempuan karena kami hadir sebagai portal berita perempuan pertama di Indonesia dengan corak jurnalisme yang sensitif gender, kami ingin menampilkan kesetaraan dalam aktualitas.

Ikuti:

- Berita-berita perempuan terbaru
- Profil tokoh-tokoh perempuan
- Artikel-artikel perempuan
- Feature perempuan
- Agenda-agenda YJP terbaru
- Konselling
- Produk-produk YJP
- Program-Program YJP
- dsb



FOR THE
HONOR OF
THE